



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SYAHRUL RAUF**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI**
3. NHK : **820727**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	13.950.000.000
------------------------------	------------	-----------------------

1. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000.000
2. Bangunan Seluas 209 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 482 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 5.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/151 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	890.000.000
---------------------------------------	------------	--------------------

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD/MINIBUS Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
3. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 350 M/T Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	43.000.000
----------------------------------	------------	-------------------

D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
--------------------------	------------	-------------

E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.026.647.009
------------------------------	------------	-----------------------

F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
-------------------------	------------	-------------

Sub Total	Rp.	27.909.647.009
------------------	------------	-----------------------



III. HUTANG

Rp. 1.235.994.856

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 26.673.652.153

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.